

PERANAN RADEN AJENG SUTARTINAH DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PENDIDIKAN UNTUK PEREMPUAN MELALUI ORGANISASI WANITA TAMANSISWA TAHUN 1922-1971

Oleh:
Ridha Laeli Insyarah Anwar dan Leli Yulifar¹

ABSTRACT

The background of this research emerged as the author's interest in the women movement especially women figure Raden Ajeng Sutartinah, her name has not heard much by society. This research has a main point about answering the question "How the Figure of Raden Ajeng Sutartinah on fighting the rightness education for Women by Wanita Tamansiswa organization between 1922-1971?". the author took a studies with applying historical method which is divided into three steps, such as heuristics, criticism and historiography. In heuristics steps, author was collected data from literature studies technic. Based on the research the author can describe that Raden Ajeng Sutartinah was the genealogies of Paku Alaman, the value of survive and struggle was obtained from the family core value that lived among the Dutch Indies colonial power in the same era. She did various paths for women educational rights from the founding of Wanita Tamansiswa organization, being the first women's congress, and fight against the illegal school policy in 1932, then the supreme leader of Tamansiswa union and Wanita Tamansiswa organization. During her struggle she was able to obtain positive achievements such as the implementation of vocational skill for women to Tamansiswa members and the founding of Taman Dewanti Foundation under the shelter to the Center of Wanita Tamansiswa organization.

Keywords: *Tamansiswa Woman organization, Women's Figure, Raden Ajeng Sutartinah*

PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah panjang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kaum perempuan dan kaum laki-laki, mereka bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa Indonesia menuju titik kemajuan. Salah satu peran penting

dalam sejarah bangsa Indonesia adalah perjuangan oleh kaum perempuan yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Bila diperhatikan pada awal abad ke-20 merupakan sebuah awal abad dimana semangat untuk memperbaiki keadaan kaum perempuan mulai bangkit. Hal ini diawali dengan adanya politik etis

¹Ridha Laeli Insyarah Anwar adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dan Leli Yulifar merupakan Dosen Pembimbing. Penulis dapat dihubungi pada email ridhalaeli@gmail.com.

yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak tahun 1901 yang telah membawa dampak positif bagi kemajuan rakyat Indonesia, salah satu program politik etis yang memberikan kesadaran terhadap nasib bangsa Indonesia yang dibedakan kedudukannya dalam masyarakat kolonial adalah tentang edukasi atau pendidikan. Poesponegoro dan Nugroho (2010, hlm. 411) mengemukakan bahwa “salah satu faktor pendorongnya adalah pendidikan Barat yang menghasilkan elite baru dalam masyarakat kolonial yang disebut elite modern”. Dimana “Pendidikan dinilai sebagai jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki nasib rakyat, karena dengan adanya perbaikan pendidikan maka nasib rakyat akan menjadi lebih baik” (Wahyu, 2014, hlm. 1). Diketahui bahwa politik etis membawa pengaruh positif bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun rakyat Bumiputera, pengaruh politik etis tentang pendidikan antara lain menurut Depdikbud (1984) ialah:

(1) Pendidikan lebih luas tidak hanya untuk lapisan atas saja tetapi juga lapisan bawah agar orang-orang Indonesia lambat laun dapat menduduki tempat-tempat yang sampai saat itu diduduki oleh orang-orang Belanda. Selain itu keuntungan dari pihak pemerintah kolonial Belanda lebih mudah mencari orang-orang yang cakap dan terampil untuk dipergunakan sebagai pegawai bawahan di kantor-kantor dan perusahaan Belanda; (2) kemajuan bagi bahasa dan kebudayaan Barat, karena kesempatan untuk belajar bahasa Belanda diperluas. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Belanda merupakan kunci memasuki dunia kerja pada waktu itu; (3) jumlah

sekolah-sekolah diperbanyak dan tersebar di seluruh Indonesia (hlm. 61).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sistem pendidikan berupa sekolah-sekolah diperbanyak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda agar setiap rakyat Bumiputera mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan Barat sampai setinggi-tingginya. Namun, dalam kenyataannya masyarakat di Indonesia pada tahun 1920 dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (China dan Arab), dan Golongan Bumiputera. Realitanya untuk dapat memasuki sekolah-sekolah tertentu masih dipersulit dengan aturan-aturan yang memberatkan, ditambah lagi dengan biaya yang sangat mahal. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menghalangi rakyat biasa memasuki sekolah-sekolah yang khusus untuk anak-anak Eropa, sehingga bagi rakyat Bumiputera terutama rakyat biasa hanya bisa menduduki sekolah pada tingkat rendah saja. Selain itu, akses pendidikan bagi kaum perempuan yang juga sangat dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda, hal ini karena pemerintah kolonial menganggap bahwa kaum perempuan Indonesia tidak selayaknya dan sepantasnya untuk mendapatkan pendidikan. Akibat dari adanya diskriminasi dan keterbatasan pendidikan tersebut, menjadikan kaum perempuan bangkit untuk memperoleh fasilitas pendidikan.

Kaum perempuan pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda juga belum mendapatkan hak yang sama dalam bidang politik dan hak pilih. Pada

masa ini, perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua, artinya kedudukan perempuan-perempuan Indonesia berada di bawah kedudukan kaum pria. Hal ini sesuai dengan sejarah yang mencatat dalam kebudayaan Jawa, bahwa perempuan sering ditempatkan sebagai “the second sex” (Nugroho, 2011, hlm. 43). Hal tersebut tercermin dari ungkapan Jawa swarga nunut neraka katut, yang berarti kebahagiaan atau penderitaan istri tergantung kepada suaminya. Ungkapan tersebut mencerminkan bahwa peran seorang perempuan dalam suatu keluarga hanya sebagai pendukung saja. Rendahnya pendidikan dan kurangnya kemampuan untuk mencari nafkah sendiri membuat kaum perempuan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri. Kaum perempuan cenderung bergantung kepada suami mereka, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap perkawinan seorang istri atau perempuan akan menerima hal tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan kaum perempuan baik dalam keluarga dan masyarakat menjadi rendah, sistem adat feodal seperti inilah yang hanya menguntungkan kaum pria dan merupakan penindasan bagi kaum perempuan. Selain itu, adanya adat istiadat yang juga menghalangi anak-anak perempuan untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Anak-anak perempuan banyak yang tidak boleh keluar rumah dan hanya berdiam diri di dalam rumah.

Keadaan inilah yang menimbulkan semangat dan usaha mengenai perbaikan nasib bangsa Indonesia mulai berkembang pada awal abad ke-20. Perbaikan nasib yang diusahakan berdasarkan atas kondisi ketidakadilan yang terjadi

dalam masyarakat akibat dari adanya ketimpangan sosial atas kolonisasi dan adat-istiadat yang melanggar hak asasi manusia. Adanya ketidakadilan yang nampak dengan jelas terhadap kaum perempuan membuat hati seorang tokoh perempuan tergerak untuk melakukan perubahan, tokoh perempuan yang hidup pada masa-masa pergerakan nasional Indonesia ia adalah Raden Ajeng Sutartinah.

Raden Ajeng Sutartinah membina gerakan perempuan Indonesia lewat organisasi baru yaitu Wanita Tamansiswa. Ia mengambil bagian untuk dapat memperbaiki nasib kaum perempuan disekitarnya. Jiwa perjuangan dan cita-cita kemerdekaan Raden Ajeng Sutartinah bukanlah barang cetakan. Jiwa dan cita-citanya merupakan sesuatu yang tumbuh secara wajar di dalam pribadinya, sesuai dengan zaman yang melahirkannya, dengan ajaran-ajaran yang diterima, dan sesuai pula dengan kemampuan pribadinya dalam menyerap dan memanfaatkan segala pengalaman hidupnya.

Penelitian ini berupaya untuk menguraikan peranan tokoh perempuan yang minim ditulis, bukan karena mereka tidak ada namun kalah oleh banyaknya tulisan tentang peranan kaum laki-laki. Artinya tulisan sejarah di Indonesia bisa dikatakan masih bersifat *male domain*, dimana laki-laki selalu menjadi tokoh utama dan perempuan sebagai pemeran pembantu. Menurut sejarawan Kuntowijoyo, “sejarah yang ditulis dengan kaum laki-laki sebagai tokoh utama dan perempuan sebagai pemeran pembantu adalah sejarah yang masih bercorak *androcentric*” (Kuntowijoyo, 2003, hlm. 115). Adapun mengenai angka

tahun yang akan dikaji adalah 1922-1971, penulis mengambil patokan awal penelitian tahun 1922 karena tahun tersebut merupakan langkah awal Raden Ajeng Sutartinah dalam memperjuangkan hak pendidikan untuk perempuan yang sudah terkoordinasi dalam suatu wadah organisasi yaitu membentuk organisasi Wanita Tamansiswa. Sedangkan, angka tahun yang dijadikan akhir penelitian ini yaitu pada tahun 1971 karena Raden Ajeng Sutartinah meninggal dunia di rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta, sehingga ia tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya yang sampai akhir hayatnya masih menjabat sebagai Pemimpin Umum Persatuan Tamansiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dan teknik studi literatur. Metode historis atau metode penelitian sejarah merupakan metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena data-data yang dibutuhkan menyangkut dengan masa lampau. Abdurahman (2007, hlm. 53) mengungkapkan bahwa “metode historis merupakan penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis”. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Gottschalk (2008) yang mendefinisikan,

Metode historis sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, ia memastikan bahwa rekaman-rekamannya sungguh-sungguh berasal dari masa lampau dan memang benar-benar apa yang tampaknya demikian dan imajinasinya

ditujukan terhadap re-kreasi dan bukan ditujukan terhadap kreasi. (hlm. 39)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sehingga diperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian ini. Pengkajian dengan studi literatur dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel dalam jurnal, majalah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat membantu penulis dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Adapun tahapan-tahapan yang akan penulis gunakan dalam penulisan penelitian sejarah ini sesuai yang dijelaskan oleh Sjamsuddin dalam bukunya Metodologi Sejarah. Terdapat tiga tahapan penulisan yang diungkapkan oleh Sjamsuddin (2012, hlm. 67-188) adalah sebagai berikut:

Heuristik

Heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau mencari materi sejarah atau evidensi sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm. 67). Kemudian menurut Ismaun (2005, hlm. 49) mengemukakan bahwa heuristik adalah pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang relevan, setelah eksplorasi literatur.

Pengumpulan sumber yang dilakukan oleh penulis tidak hanya terpaku kepada pengumpulan sumber mengenai tokoh utama penulis saja, namun penulis juga mencari sumber lain yang dapat membantu dalam proses penulisan penelitian ini, seperti sumber mengenai keadaan pendidikan untuk perempuan

pada masa kolonial dan konsep-konsep lainnya yang dapat menambah kajian penulis. Hal tersebut dilakukan guna memperkaya kajian yang akan dihasilkan nantinya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur atau studi kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan dan analisis suatu materi yang berhubungan dengan topik pembahasan yang relevan dengan kajian penulis.

Kritik

Setelah menemukan sumber sejarah yang diperlukan, maka sebagai usaha dalam mencari kebenaran (*truth*) sejarawan akan dihadapkan kepada kebutuhan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar atau palsu, serta apa yang mungkin dan apa yang meragukan. Kemampuan tersebut pada dasarnya harus dimiliki oleh seorang sejarawan, sehingga ketidakbenaran dalam suatu cerita sejarah dapat diminimalisirkan. Hal ini sejalan dengan Jacques Barzun & Henry F. Graff (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 103) yang mengemukakan bahwa semua sejarawan harus mengerahkan segala kemampuan pikirannya, bahkan seringkali ia harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu (skeptis), percaya begitu saja, menggunakan akal sehat, dan melakukan tebakan inteligen.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dalam melakukan sebuah penelitian sejarah harus dibutuhkan sebuah proses ilmiah sehingga sumber sejarah yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan, karena itulah diperlukannya kritik sumber. Dalam penelitian sejarah, mengenal dua cara kritik sumber yakni kritik

internal (kredibilitas) dan kritik eksternal (otentisitas atau keaslian sumber).

Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Dalam kegiatan ini penulis menyajikan hasil temuan pada tahapan heuristik, dan kritik dengan cara menyusunnya menjadi sebuah bentuk tulisan. Dalam penelitian kualitatif, seperti sejarah, difokuskan kepada fakta kejiwaan (*mentifact*), fakta hubungan sosial (*sosifact*), dan fakta benda (*artifact*), yang memang tidak tersentuh oleh penelitian kuantitatif, ketiga fakta tersebut ditafsirkan dan dituliskan menjadi karya sejarah (Priyadi, 2012, hlm. 79).

Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirnya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi (Sjamsuddin, 2012, hlm. 121).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wanita Tamansiswa sebagai Sebuah Organisasi

Wanita Tamansiswa adalah organisasi perempuan dalam lingkungan Tamansiswa, yang berasas dan bertujuan sama dengan Tamansiswa. Organisasi Wanita Tamansiswa yang pertama-tama keberadaannya ada di Yogyakarta pada 3 Juli 1922 (Yuliati, 2016, hlm. 126). Raden Ajeng Sutartinah atau lebih dikenal dengan sebutan Nyi Hadjar Dewantara, menjadi

pendirinya dibantu oleh ibu-ibu lain diantaranya: Ibu Rumsiah, Ibu Jumilah, Ibu Siti Marsidah dan Ibu Sutatmo.

Latar belakang dari dibentuknya organisasi Wanita Tamansiswa sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurang dihargainya kaum perempuan di mata pria. Hal tersebut disebabkan adanya tradisi budaya feodalisme dan patriarki di lingkungan Pulau Jawa khususnya disekitar tempat tinggal Raden Ajeng Sutartinah. Selain itu, faktor lahirnya politik etis yang membuat kaum perempuan ingin memajukan pendidikan bagi perempuan sendiri. Faktor lainnya adalah munculnya kesadaran pentingnya kaum perempuan di lingkungan Tamansiswa sendiri.

Semula keanggotaan organisasi Wanita Tamansiswa hanya terbatas pada ibu-ibu pamong dan istri pamong dalam lingkungan Tamansiswa saja, akan tetapi persyaratan tersebut diperluas meliputi perempuan-perempuan di dalam dan di luar lingkungan Tamansiswa yang menyatakan setuju terhadap asas dan tujuan Wanita Tamansiswa. Nama Raden Ajeng Sutartinah tentu saja tidak dapat dipisahkan dari organisasi Wanita Tamansiswa. Di bawah kepemimpinannya dan dengan bersemboyan “Suci Tata Ngesti Tunggal”, Wanita Tamansiswa melaksanakan darmanya untuk kepentingan kaumnya, bangsa dan negara, “suci” batinnya, “Tata” atau tertib lahirnya, “Ngesti” atau menuju, “Tunggal” berarti satu atau sempurna (Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia, 1986, hlm. 315).

Selama kira-kira satu windu lamanya, bentuk dan struktur organisasi tersebut sangatlah sederhana. Kemudian pada

tanggal 31 Maret 1931, mengingat telah berdiri beberapa organisasi Wanita Tamansiswa di luar kota Yogyakarta, dibentuklah Pengurus Pusat yang ada pada masa-masa berikutnya disebut Badan Pusat Wanita Tamansiswa yang berkedudukan di Yogyakarta hingga sekarang.

Dengan maksud agar tidak menyalahi pengertian secara formal maka Wanita Tamansiswa tidak menggunakan istilah lahir melainkan keberadaan atau kehadiran Wanita Tamansiswa. Pada tanggal 3 Juli bukanlah disebut hari lahir Wanita Tamansiswa tetapi Hari Wanita Tamansiswa. Perubahan tersebut salah satunya adalah faktor setelah diadakannya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam buku Kenangan Tujuh Dasa Warsa Wanita Tamansiswa (1992) yakni:

Bahwa seperti halnya Tamansiswa yang baru pada tahun 1930 dibentuk sebagai organisasi (dengan pengertian sejak tahun 1922 sampai tahun 1930 tidak ada pertalian “organisatoris”) demikian pula Wanita Tamansiswa baru pada tahun 1931 menjadi Badan Wanita Tamansiswa, atas putusan Konferensi Daerah Jawa Tengah yang diadakan di Yogyakarta. Keputusan ini masih akan disahkan dalam Rapat Besar (=Konferensi Nasional). Pengurus Tamansiswa, Majelis Wanita Tamansiswa yang sudah ada menjadi penasihat Badan Wanita Tamansiswa tersebut. sebagai pengurus yang dipilih dalam konferensi tersebut adalah:

Nyi Hadjar Dewantara sebagai ketua
Ni Surip sebagai Panitera
Nyi Sudarminto sebagai anggota

Nyi S. Sukemi sebagai anggota

Nyi Sri Mangunsarkoro sebagai Wakil
Pusat di Jawa Barat

Nyi Sudjarwo sebagai Wakil Pusat di
Jawa Timur (hlm. 7).

Terselenggarakannya peristiwa Konferensi Tamansiswa Daerah Jawa Tengah ini atas inisiatif dari ibu Tamansiswa antara lain Raden Ajeng Sutartinah dan Sri Mangunsarkoro. Peristiwa ini disambut oleh Ki Hadjar Dewantara dengan kata-kata 'lahirlah cabang bayi' yang kemudian akan tercatat dalam '*Burgelijke Stand*' atau 'Catatan Sipil' (kata kiasan) pada Konferensi Besar yang akan datang, sebagai badan yang sah dalam lingkungan Tamansiswa.

Konferensi ini merupakan tonggak sejarah berdirinya organisasi Wanita Tamansiswa (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2000, hlm. 299). Wanita Tamansiswa lahir sebagai organisasi karena adanya tujuan yang jelas yakni menciptakan masyarakat tertib damai, diketahui oleh segenap pihak dan bahwa anggota-anggotanya yakin akan kebenaran tujuan tersebut. Agar organisasi ini dapat berjalan lancar, dibuatlah peraturan-peraturan yang disetujui oleh anggota-anggotanya.

Hal yang memegang peranan penting dalam setiap organisasi adalah adanya hubungan yang erat dan harmonis berdasarkan kepentingan bersama. Hubungan harmonis tidak hanya pada tugas-tugas organisasi itu, akan tetapi juga antara orang-orang yang menjalankan tugas-tugas itu. Jadi koordinasi harus ada antara tugas-tugas dan antara orang-orang yang menjalankan tugas itu.

Sebagai organisasi yang otonom, maka tata kehidupan Wanita Tamansiswa diatur dalam Peraturan Besar Wanita Tamansiswa. Sedangkan mengenai tata hubungan kerja sebagai organisasi antara Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa dan Badan Pusat Wanita Tamansiswa diatur melalui suatu Surat Keputusan Bersama, sebagai hasil pemikiran bersama antara kedua belah pihak tersebut.

Wanita Tamansiswa merupakan organisasi yang berkedudukan di dalam lingkungan Tamansiswa. Oleh karena itulah, organisasi Wanita Tamansiswa berkewajiban membantu Tamansiswa dalam segala usahanya, khususnya pendidikan keperempuanan. Fungsi lainnya dari organisasi wanita Taman Siswa antara lain: kesucian dalam masyarakat Tamansiswa, memelihara hubungan kekeluargaan dalam lingkungan Tamansiswa, mengadakan hubungan dengan dunia pergerakan perempuan di luar Tamansiswa, yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Wanita Tamansiswa, dan ikut serta dalam mensukseskan pembangunan negara (Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia, 1986, hlm. 315).

Kewajiban dari visi dan misi organisasi Wanita Tamansiswa menuntut agar para anggota Wanita Tamansiswa dilengkapi dengan berbagai macam keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pembangunan. Berhubung Tamansiswa berkecimpung dalam bidang mental dan kebudayaan, maka anggota Wanita Tamansiswa wajib mengenal berbagai macam unsur dan nilai kebudayaan baik milik sendiri maupun asing.

Selain itu, organisasi mendorong para anggotanya untuk berperan dalam masyarakat dan menggunakan haknya sebagai warga negara. Perempuan merupakan kekuatan sosial yang potensial bagi pembangunan negara dan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kaum pria.

Peran aktif perempuan di luar rumah tangga itu tidak boleh diabaikan. Para perempuan harus sadar bahwa mereka merupakan kekuatan yang potensial bagi pembangunan negara. Atas dasar itulah, maka dalam proses pendidikan kepada anak-anak putri harus sudah diletakkan dasar-dasar kesadaran tersebut.

Anak-anak putri harus dididik menjadi manusia-manusia yang luhur budinya, susila, terampil dalam menghadapi tantangan hidup sehingga perlu ditanamkan disiplin kekeluargaan secara terus menerus yang nantinya akan memberi keuntungan bagi perkembangan mereka selanjutnya (Soeratman, 1979, hlm. 20).

Raden Ajeng Sutartinah dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua berusaha menjalankan roda organisasi agar sesuai asas Tamansiswa dan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk mewujudkan peran sertanya ke dalam masyarakat yang tepat guna, Wanita Tamansiswa di bawah arahan Raden Ajeng Sutartinah secara sadar dan berencana telah menetapkan tujuannya seperti yang tercantum dalam Pembukaan Peraturan Besar Wanita Tamansiswa. Peraturan Besar ini merupakan pegangan kerja baik ke dalam maupun sebagai pembawa diri Wanita Tamansiswa ke dalam masyarakat luas secara mantap.

Raden Ajeng Sutartinah sebagai Pemrakarsa Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama

Wanita Tamansiswa menjelma menjadi kelompok yang dalam pengabdianya semain menyemarakkan dunia pendidikan. Tamansiswa pada akhirnya dipandang identik dengan Raden Ajeng Sutartinah. Keduanya pun tidak dapat terpisahkan dan seiring dengan perkembangan zaman, Wanita Tamansiswa tumbuh menjadi suatu organisasi dengan segala kelengkapannya.

Menurut Nyi Ratih Saleh Lahade (dalam Badan Pusan Wanita Tamansiswa, 1992, hlm. 29) bahwa sifat dari Nyi Hadjar sebagai pamong yang berwawasan “Pamomong” selalu memberi kesempatan kepada kader-kader yang telah terlatih dan cukup dibekali untuk berkiprah dibidangnya masing-masing. Maka tidaklah heran kalau banyak Wanita Tamansiswa terampil bergerak di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang memang mendambakkan pejuang-pejuang perempuan demi kemajuan pendidikan dan hak-hak emansipasi perempuan lainnya.

Di sisi lain, Raden Ajeng Sutartinah menyadari pula bahwa tidak seorangpun dapat memaksakan kehendaknya yang subyektif atas jalannya sejarah dan kodrat-iradatnya zaman, kecuali harus berjuang dan berusaha memasukkan kekuatan-kekuatan manusiawinya seiring dengan perkembangan zaman. Wanita Tamansiswa tidak akan ketinggalan dari gerak langkahnya Tamansiswa. Tamansiswa melalui pendidikan nasionalnya berjuang membawa rakyat Indonesia tidak hanya menjadi rakyat yang cerdas, tetapi juga membuat rakyat yang berjiwa merdeka

serta membuat rakyat Indonesia yang berkebudayaan, berkepribadian dan yang sanggup berdiri sendiri.

Di bawah kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah, organisasi Wanita Tamansiswa semakin meningkatkan kegiatannya, khususnya untuk memajukan kaum perempuan. Raden Ajeng Sutartinah mengirim artikel-artikel keperempuanan di beberapa majalah. Pada saat itu di dalam Tamansiswa sendiri menurut Sajoga (dalam Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1952, hlm. 227) telah diterbitkan majalah "Wasita" yang terbit pada tahun 1928, dan pada tahun 1931 keluar majalah "Pusara" yang sampai sekarang masih tetap menjadi organ persatuan.

Raden Ajeng Sutartinah mengadakan siaran-siaran di radio Mavro Yogyakarta. Pada zaman kolonial, di Yogyakarta didirikan sebuah studio radio swasta yang diberi nama radio Mavro. Radio ini digunakan sebagai alat perjuangan rakyat yang dalam salah satu rubrik siarannya berisi tentang masalah kebudayaan. Siaran radio ini diselenggarakan di pendopo Dewantara dengan sebutan gelombangnya radio Wasita.

Dalam siaran radio ini, Raden Ajeng Sutartinah sering memberikan ceramah mengenai kesusilaan, keperempuanan, kebudayaan, dan kesusastraan Jawa (Fauziah, 2010, hlm. 84-85). Kepiawaian Raden Ajeng Sutartinah dalam membuat artikel dipelajari dan mendapat pengaruh dari sosok suaminya yaitu Suwardi Suryaningrat yang merupakan seorang jurnalis. Semenjak menikah dengan Suwardi Suryaningrat, Raden Ajeng Sutartinah menyadari bahwa dia harus rajin membaca, belajar dan mengetahui

segala situasi masalah-masalah perjuangan yang dihadapi oleh suaminya.

Menyadari bahwa upaya yang besar tidak mungkin kalau hanya dikerjakan sendirian, maka Wanita Tamansiswa beserta Raden Ajeng Sutartinah juga melangkah ke luar (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1982, hlm. 237). Salah satu hal usaha ke luar yang tidak boleh kita lupakan adalah keterlibatan Raden Ajeng Sutartinah yang tercatat sebagai pemrakarsa diadakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama yang berlangsung pada tanggal 22 s.d 25 Desember 1928.

Raden Ajeng Sutartinah kemudian menemukan sahabat yang serasi pikiran dan jiwanya bersama dengan Ibu Soekonto dari Wanita Oetomo dan seorang pejuang perempuan yang dinamis yaitu Nona Soejatin dari Putri Indonesia. Mereka bertigalah yang bersepakat untuk menyatukan seluruh gerakan perempuan Indonesia yang pada waktu itu masih dijangkiti provinsialisme ke dalam satu persatuan dan kesatuan gerak untuk persatuan bangsa, kebersamaan, dan persamaan hak.

Ki Hadjar Dewantara menyebut peristiwa itu sebagai tonggak sejarah pergerakan perempuan Indonesia dan mengakhiri sambutannya dengan tembang *witing klapa*, yang melambangkan perempuan sebagai makhluk yang sanggup dan mampu mengatur masyarakat (Kartowijono, 1982, hlm. 6). Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting artinya bagi pergerakan perempuan Indonesia. Para pemrakarsa kongres ini merasa bahwa kaum perempuan di Indonesia saat itu

masih kurang dalam hal apapun termasuk kepandaian dan kemajuan, sehingga kaum perempuan Indonesia sangat ketinggalan dengan kaum perempuan dari negara lain.

Raden Ajeng Sutartinah dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini berkedudukan sebagai anggota biasa. Raden Ajeng Sutartinah memberikan pidatonya sebagai salah seorang yang mempunyai inisiatif dalam pelaksanaan kongres ini. Pidato ini disampaikan dalam penyampaian pokok-pokok pikiran pada acara Pemandangan Umum, dengan judul Adab Perempuan. Isi dari pidato Raden Ajeng Sutartinah adalah mengenai keadaban. Keadaban itu menurut Raden Ajeng Sutartinah adalah tingkah laku yang utama, adat yang halus, tertib dan selaras, dan tingkah laku lahir itu sungguh berhubungan dengan batin seseorang. Keadaban itu juga merupakan alat untuk menghargai, dan sesungguhnya dengan keadaban ini yang akan dihargai adalah dirinya sendiri.

Raden Ajeng Sutartinah menyampaikan bahwa perempuan didunia ini adalah sebagai pemangku keturunan (atau tempat tumbuhnya manusia). Maksudnya perempuan itu adalah seorang yang memegang peranan penting dalam perkembangan manusia yang dilahirkannya, baik secara fisik maupun mentalnya. Untuk itu seorang perempuan harus memiliki pedoman dan pegangan hidup yang kuat untuk mencapai keselamatan, yaitu dengan adab yang baik.

Pada dasarnya yang memegang peranan penting dalam perkembangan baik dan buruknya adab manusia itu adalah perempuan, karena perempuan itu lebih memiliki ikatan batin yang kuat dengan manusia yang dilahirkannya. Sehingga

suatu bangsa tidak akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya apabila mereka tidak bisa menghargai perempuan (Blackburn, 2007, hlm. 244). Perempuan menurut Raden Ajeng Sutartinah haruslah dapat menjaga harga dirinya dan menjalankan kewajibannya.

Keberhasilan Raden Ajeng Sutartinah sebagai salah satu pemrakarsa Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tanggal 22 Desember-25 Desember 1928 di Mataram, Yogyakarta bukan berarti membuat perjuangan kaum perempuan selesai. Dengan terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini, menjadi langkah pijakan untuk memajukan kaum perempuan dalam berbagai segi kehidupan, antara lain untuk mendapatkan hak pendidikan dengan memperbanyak sekolah-sekolah putri, hak demokrasi dan jaminan hidup.

Berjuang Melawan “Ordonansi Sekolah Liar” Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1932

Salah satu dampak yang merasakan ordonansi sekolah liar adalah Tamansiswa. Hal tersebut dilatarbelakangi pertumbuhan Tamansiswa yang begitu cepat. Pemerintah Hindia Belanda segera menimpakan pukulannya dengan maksud untuk mematikan Tamansiswa itu sendiri. Maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang yang dinamakan *Wilde Scholen Ordonantie* (Ordonansi Sekolah Liar) pada tanggal 17 September 1932 yang terdapat dalam *Staatsblad* nomor 494 tahun 1932 dan Ordonansi sekolah liar ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1932 (Bratastiswara, 1997, hlm. 43). Adapun maksud dari ordonansi itu ialah memberi

kuasa kepada pemerintah untuk mengurus wujud dan isinya sekolah-sekolah partikelir yang tidak dibiayai oleh negeri, misalnya: sekolah partikelir harus minta izin dahulu, demikian juga guru-gurunya sebelum memberi pelajaran harus mempunyai izin.

Selain itu isi pelajaran harus pula tidak melanggar peraturan negeri dan sesuai dengan sekolah negeri (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1952, hlm. 230). Undang-Undang Sekolah Liar yang dikeluarkan dengan tiba-tiba, membuat Tamansiswa tidak sempat mengadakan kongres untuk membicarakannya. Maka dengan dasar wewenang yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Tamansiswa, Ki Hadjar Dewantara selaku Pemimpin Umum mengambil kebijaksanaan untuk melawan undang-undang tersebut (Dewantara, 1984, hlm. 115).

Ordonansi Sekolah Liar telah menghambat perjuangan bangsa Indonesia dan juga merampas kemerdekaan Tamansiswa beserta Organisasi Wanita Tamansiswa sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan nasional. Hal ini dianggap sebagai suatu penghinaan bagi bangsa Indonesia juga, yang dianggap tidak mampu menyelenggarakan sekolah-sekolah yang baik untuk anak-anaknya (Majelis Luhur Persatuan Indonesia, 1982, hlm. 65).

Ki Hadjar Dewantara menyatakan tekad Tamansiswa dan Wanita Tamansiswa untuk melawan undang-undang sekolah liar tersebut dengan cara Satyagraha atau perlawanan dengan tenaga diam sampai titik darah penghabisan. Kemudian, Ki Hadjar Dewantara mengirimkan maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan rakyat mengenai bahaya dari adanya Ordonansi Sekolah Liar dan

bagaimana sikap yang akan diambil oleh Tamansiswa maupun Wanita Tamansiswa yang saat itu masih diketuai oleh Raden Ajeng Sutartinah (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1952, hlm. 231).

Pernyataan-pernyataan dan tekad yang diberikan oleh organisasi Wanita Tamansiswa melalui Raden Ajeng Sutartinah telah menyebabkan pemerintah Hindia Belanda bertindak tegas dengan ditutup dan disegelnya Tamansiswa. Meskipun demikian, Raden Ajeng Sutartinah terus berjuang untuk melawan *Onderwijs Ordonantie* sekolah partikelir. Adapun pesan Ki Hadjar Dewantara kepada para Wanita Tamansiswa dikutip (dalam Dewantara, K.H, 1932) untuk menghadapi perjuangan seterusnya menentang Ordonansi Sekolah Liar tersebut, sebagai berikut:

Adapun pokoknya soal itu kaum wanita kita harus menetapkan sendiri apa dan seberapa bahagianya masing-masing dalam aksi kita itu, agar dapat bertenaga laras dengan kodratnya dan berfaedah untuk gerakan kita. Dalam hal ini haruslah diperingati, bahwa diantara anggota kita laki-laki juga harus ada diferensiasi: *denkers, schrijvers, strijders, propagandisten, organisatoren*, dsb, akan tetapi tentang menanggung kejadian-kejadian dari perbuatannya dalam pencegahan ordonansi itu buat kaum laki-laki tak usah menjadikan pikiran panjang. Lain sekali keadaannya dengan kaum perempuan kita. Menurut anggapan kita mereka itu tidak selayaknya dipersamakan tenaganya dengan kaum laki-laki, terkecuali kalau dengan kemauannya sendiri. beranikah misalnya, kita perintah pada mereka

untuk masuk ke dalam penjara....? kami tidak berani, tidak berani terhadap pada geweten kami. Lain sekali, kalau keikhlasan pengorbanan itu keluar sendiri dari kemauan kaum wanita kita sendiri. Maka dari itu kita harus dengar suara dari wanita kita sendiri, yang sementara tentu ada yang berwatak-Srikandi, ada pula yang berbudi-Soebadra.

Srikandi-Srikandi : Majulah ke muka!

Sumbrada-Sumbrada : Dirikanlah Balatentara “palang merah” dan peliharalah kawan-kawanmu yang jatuh ! (hlm. 20).

Raden Ajeng Sutartinah bersama pemimpin-pemimpin Tamansiswa lainnya mengadakan gerilya pendidikan, dengan menggunakan semboyan “patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu”. Gerilya pendidikan ini adalah suatu cara untuk melaksanakan pendidikan secara sembunyi-sembunyi, misalnya dengan melaksanakan pendidikan di rumah guru atau rumah sukarelawan dan sukarelawati guru (Fauziah, 2010, hlm. 106).

Arahan yang diberikan oleh Raden Ajeng Sutartinah kepada guru-guru Tamansiswa, bahwa guru-guru di Tamansiswa mendatangi setiap rumah penduduk untuk mengajar di rumah masing-masing murid. Apabila dalam pelaksanaannya seorang guru ketika sedang mengajar atau secara terang-terang melawan Ordonansi Sekolah Liar ini ditangkap sukarelawan dan sukarelawati guru datang menggantikan tugas guru yang ditangkap dan dipenjarakan itu, sehingga murid-murid dapat belajar terus

walaupun pemerintah Hindia Belanda terus melakukan penekanan.

Dengan aksi ini, maka banyak simpati datang dari massa anggota organisasi pergerakan dan partai-partai datang membanjiri Tamansiswa. Berpuluh-puluh bahkan ratusan pejuang mencatatkan diri kepada Tamansiswa sebagai sukarelawan dan sukarelawati guru untuk siap menggantikan tugas guru yang ditangkap, dengan konsekuensi siap pula untuk ditangkap (Dewantara, 1984, hlm. 116).

Perlakuan *Onderwijs Ordonnantie* sekolah partikelir secara tidak langsung telah mempersatukan pergerakan kebangsaan Indonesia. Di mana gerakan “Gerilya Pendidikan” yang dilakukan oleh Tamansiswa maupun Wanita Tamansiswa di bawah arahan Raden Ajeng Sutartinah dan organisasi-organisasi lainnya telah menyudutkan posisi pemerintah Hindia Belanda. Ki Hadjar Dewantara dan Raden Ajeng Sutartinah sebagai pemimpin Tamansiswa dan organisasi Wanita Tamansiswa terus melawan kebijakan undang-undang yang dikeluarkan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda terpaksa mencabut kembali Ordonansi Sekolah Liar itu dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 13 Februari 1933 no. 18, untuk membatalkan Ordonansi Sekolah Liar 17 September 1932 no. 494 dan berlaku mulai 21 Februari 1933 (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1982, hlm. 66). Upaya keras yang dilakukan oleh Raden Ajeng Sutartinah dalam membantu melawan Ordonansi Sekolah Liar pemerintah Hindia Belanda, menunjukkan suatu bukti bahwa kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah mitra sejajar yang dapat saling membantu dalam menghadapi berbagai masalah.

Peranan Raden Ajeng Sutartinah dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan untuk Perempuan

Seluruh usaha Raden Ajeng Sutartinah sudah selayaknya terus dikenang dan terus diperjuangkan, karena bagi Raden Ajeng Sutartinah sendiri perjuangan belum seratus persen tuntas. Bagi Raden Ajeng Sutartinah, Bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan harus terus berjuang untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu menjadi istri, ibu, dan pendidik bagi generasi penerus bangsa.

Selama berjuang Raden Ajeng Sutartinah telah membawa hasil positif yang berhasil ciptakan bagi kaum perempuan di Indonesia secara umumnya, dan bagi Wanita Tamansiswa khususnya. Telah diketahui bahwa Raden Ajeng Sutartinah merupakan salah seorang pemrakarsa dari diadakannya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Keberhasilannya sebagai pemrakarsa sekaligus pelopor dari pergerakan perempuan ini berhasil menciptakan hasil yang positif dalam hal memperjuangkan hak-hak pendidikan untuk perempuan di Indonesia di antaranya yaitu:

1. Berhasil mendirikan Study Fonds atau beasiswa, dengan tujuan membantu para gadis yang tidak mampu membayar sekolah untuk tetap bisa bersekolah. Beasiswa tersebut diberi nama "Seri Derma" dan berbentuk yayasan.
2. Ditanamkan pengertian agar perempuan Indonesia dapat menjadi "Ibu Bangsa", yang berarti dapat menumbuhkan dan mengembangkan generasi yang lebih sadar akan rasa kebangsaannya.

3. Memperbaiki nasib kaum buruh perempuan Indonesia melalui pendidikan (Ridjal, dkk, 1992, hlm. 102)

4. Membuka Yayasan Taman Pendidikan Dewanti yang bernaung di bawah Badan Pusat Wanita Tamansiswa. Yayasan ini berhasil membuat Taman Balita dan rutin mengadakan penyuluhan pendidikan khususnya pendidikan untuk perempuan sejak dini, kepada orang tua anak-anak Taman Balita serta ibu-ibu dari masyarakat di sekitar lingkungan Tamansiswa (Probopranowo, 1992, hlm. 246).

Salah satu hasil yang telah dilakukan oleh Raden Ajeng Sutartinah dalam hal hak pendidikan untuk perempuan melalui organisasi Wanita Tamansiswanya yakni terselenggarakannya pembinaan pendidikan keperempuanan kepada siswi-siswi putri Tamansiswa dan pembinaan pendidikan dan latihan keterampilan keperempuanan kepada anggota organisasi dan anggota keluarga Wanita Tamansiswa. Pembinaan tersebut terus berlanjut hingga dijadikan sebagai Program Kerja dalam Organisasi Wanita Tamansiswa yang disahkan dalam Kongres ke-XII pada tahun 1979, sesuai dengan Peraturan Besar Wanita Tamansiswa pasal 6 tentang Usaha serta Pasal 10 tentang Kewajiban (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1982, hlm. 241).

Pembinaan keperempuanan tersebut sangat berguna dan menjadi bekal bagi para anggota organisasi dan anggota keluarga Wanita Tamansiswa karena dengan adanya pembinaan itu sendiri dapat mengangkat derajat kaum perempuan dan menjadikan perempuan menjadi mandiri dengan kemampuan dan keterampilan

yang telah dimilikinya untuk kehidupan masa sekarang dan masa mendatang.

Selanjutnya, atas jasa-jasa kepada nusa dan bangsa yang telah Raden Ajeng Sutartinah berikan lewat dharma baktinya dalam Tamansiswa dan organisasi Wanita Tamansiswa, khususnya mengenai gerakan perempuan Indonesia. Maka dengan Surat Keputusan Menteri Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tanggal 16 April 1961 No. Pol. 52/61/PK ditetapkan sebagai perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan Republik Indonesia. kemudian, penghargaan juga diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 April 1968 No. 012/TK/1968 Raden Ajeng Sutartinah menerima anugrah Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan (Dewantara, 1984, hlm. 125).

SIMPULAN

Segala upaya yang dilakukan oleh Raden Ajeng Sutartinah dalam memperjuangkan hak pendidikan untuk perempuan melalui organisasi Wanita Tamansiswa tidak lah mudah. Berbagai usaha pun dilakukan mulai dari internal organisasi Wanita Tamansiswa sebagai langkah awal dia berjuang hingga usaha eksternal bekerja sama dengan organisasi perempuan lainnya di luar Wanita Tamansiswa dilakukan oleh Raden Ajeng Sutartinah.

Usaha eksternal ini berhasil membawa Raden Ajeng Sutartinah sebagai salah satu pemrakarsa dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, kongres ini menjadi momentum sejarah yang sangat penting bagi pergerakan perempuan di Indonesia, yakni sebagai pendobrak dari hak-hak perempuan salah satunya adalah hak pendidikan. Kemudian, usaha keras

lain yang dilakukan oleh Raden Ajeng Sutartinah bersama Wanita Tamansiswa yakni berjuang melawan sebuah Ordonansi Sekolah Liar yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1932.

Perlawanan ini berhasil menunjukkan sebuah peristiwa penting karena pemerintah Hindia Belanda pada akhirnya mencabut kembali Ordonansi Sekolah Liar, hal ini merupakan prestasi luar biasa dari Raden Ajeng Sutartinah dalam memperjuangkan hak pendidikan khususnya untuk perempuan yang direnggut oleh Ordonansi Sekolah Liar di tubuh Tamansiswa. Perjuangan adalah perjuangan, perjuangan tidaklah selembut pribadi Raden Ajeng Sutartinah, maka tidak heran ketika menjelang akhir hayatnya Raden Ajeng Sutartinah telah membuat suatu kejutan. Kejutan yang dimaksud ialah bahwa Raden Ajeng Sutartinah dapat menjadikan tangannya sebagai 'tangan besi' dengan mengesampingkan emosi di dalam jiwa keibuannya.

Banyak orang yang mengira ketika Raden Ajeng Sutartinah menjabat sebagai Pemimpin Umum Majelis Luhur Tamansiswa tidak mungkin dapat mengatasi krisis politik yang terjadi di dalam tubuh Tamansiswa dan organisasi Wanita Tamansiswa, karena umumnya mereka hanya tahu bahwa Raden Ajeng Sutartinah bukanlah seorang organisatoris dan bukan pula seorang politikus handal melainkan hanya seorang ibu. Namun, semua dugaan tersebut berhasil dipatahkan oleh Raden Ajeng Sutartinah yang berhasil mengatasi berbagai krisis perpecahan dalam tubuh Tamansiswa akibat dari adanya pertentangan-pertentangan ideologi dan politik yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Kalau saja itu tidak terjadi, kemungkinan besar Tamansiswa dan organisasi Wanita Tamansiswa sudah terpecah belah dan masuk ke dalam jurang pertentangan politik serta ideologi yang berlarut-larut dan tidak berfokus lagi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Semua hasil-hasil positif yang ditinggalkan bukanlah sebuah harta benda, melainkan mutiara kehidupan yang tidak ternilai telah Raden Ajeng Sutartinah wariskan kepada generasi penerus dalam melanjutkan perjuangannya. Alat musik Angklung Gubrag sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat Cigudeg sebagai media ritual dalam upacara Seren Taun yang bertujuan untuk memuja Nyi Pohaci. Penggunaannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Badan Pusat Wanita Tamansiswa.(1992). *Kenangan Tujuh Dasa Warsa Wanita Tamansiswa 3 Juli 1922-3 Juli 1992*. Yogyakarta: Badan Pusat Wanita Tamansiswa.
- Blackburn, S. (2007). *Kongres Perempuan Pertama Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV.
- Bratisiswara, H. (1997). *Dr. Ki Hadjar Dewantara, Pejuang, Pendidikan, Budayawan dan Pahlawan Nasional*. Surakarta: Rekso Pustoko.
- Depdikbud. (1984). *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan kebudayaan Daerah.
- Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia. (1986). *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 1928-1978*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewantara, B.S. (1984). *Nyi Hajar Dewantara dalam Kisah dan Data*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Dewantara, K.H. (1932, November). *Wanita Taman Siswa, Bersedialah! Soebadra2 dan Srikandiz*. Poesara (2), hlm. 20.
- Fauziah, N. (2010). *Peranan R.A Soetartinah pada Perkembangan Tamansiswa di Yogyakarta Tahun 1922-1971*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Gottschalk, L. Notosusanto, N (penejemah). (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Ismaun, H.(2005). *Pengantar Belajar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press.
- Kartowijono, S. (1982). *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Kuntowijoyo.(2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. (1952). *Riwayat Perjuangan Tamansiswa 30 Tahun: 1922-1952*. Yogyakarta: Percetakan Tamansiswa.
- Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. (1982). *Buku Peringatan Tamansiswa 60 Tahun 1922-1982*. Yogyakarta: Penerbitan Tamansiswa.
- Majelis Luhur Pesatuan Tamansiswa. (2000). *Tamansiswa Bunga Rampai Pemikiran*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Tamansiswa.
- Nugroho, R. (2011). *Gender dan Strategi Pengarus-utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyadi, S.(2012). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Poesponegoro, M dan Nugroho, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Probopranowo, M.(1992). *70 Tahun Tamansiswa 1922-1992*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Ridjal, F, dkk.(1992). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sjamsuddin, H.(2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soeratman, D.(1979). *Wanita Taman Siswa dan Hidup Kekeluargaan*. Yogyakarta: Badan Pusat Wanita Taman Siswa.
- Wahyu, I.(2014). *Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Tahun 1935-1988* .(Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yuliati, Y. (2016). Konsep Pendidikan Perempuan di Taman Siswa. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10 (1), hlm. 114-124. Diakses dari journal2.um.ac.id.